

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Pemikiran

Pada era globalisasi saat ini sangatlah mudah bagi masyarakat dunia dalam mengakses suatu informasi dari negara satu dengan negara lainnya melalui media sosial maupun media cetak tak terkecuali dengan Indonesia. Mudahnnya dalam mengakses suatu informasi di suatu Negara merupakan suatu proses dalam mewujudkan pencapain tujuan kesejahteraan masyarakat. Membahas mengenai masalah kesejahteraan masyarakat tidak akan pernah terlepas dari pengaruh ekonomi.

Peran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Indonesia sangatlah dibutuhkan dalam perkembangan ekonomi. Selain menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, pemerintahan perlu meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusiannya, tentu saja dalam hal meningkatkan mutu sumber daya manusia tersebut perlu adanya instansi/lembaga ataupun organisasi *non profit* yang khusus menanganinya. Organisasi *non profit* merupakan suatu organisasi yang tidak bersifat moneter atau mencari laba. Organisasi *non profit* meliputi gereja, sekolah negeri, derma publik, rumah sakit dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, organisasi jasa sukarelawan, serikat buruh, asosiasi profesional, institut riset, museum, dan beberapa para petugas pemerintah. (Anonim Unikom, 2019:1). Sebagaimana halnya dengan organisasi swasta (perusahaan), organisasi pemerintah/non profit melakukan berbagai kegiatan ekonomi baik itu

penerimaan ataupun pengeluaran kas guna membiayai kegiatan-kegiatan yang dianggarkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Menjadi salah satu organisasi pemerintahan dibidang pengembangan sumber daya manusia, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan atau yang sering disebut LPMP adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat didalam ruang lingkup Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yang secara teknis dikoordinasi oleh Direktorat Tenaga Kependidikan. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan tersebar disetiap daerah provinsi di Indonesia, termasuk di provinsi Yogyakarta dengan tujuan pemerataan tingkat kualitas Pendidikan dari Pendidikan tingkat dasar, menengah serta Taman Kanak-Kanak (TK) maupun jenis pendidikan lain yang sederajat secara nasional sesuai dengan standar nasional pendidikan (LPMP Kemendikbud, 2015).

LPMP juga melaksanakan kegiatan ekonomi penerimaan dan pengeluaran kas sama seperti halnya dengan organisasi pemerintahan lainnya. Selain penerimaan kas dari pemerintah yang sesuai dengan Rencana Kegiatan Anggaran Lembaga (RKAL) yang telah disusun, penerimaan kas Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak atau sering disebut dengan PNBPNP.

PNBNP merupakan suatu pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung atau manfaat tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh. (Sekertariat Jendral Kemendikbud, 2018). Penerimaan PNBPNP yang sering diterima oleh pihak

LPMP ada PNBPN atas pemanfaatan Barang Milik Negara seperti sewa gedung dan tanah.

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diterima LPMP merupakan kategori PNBPN umum dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengharuskan penyetoran keseluruhan kas yang diterima kepada Negara. Meskipun kas yang diterima harus disetorkan kepada negara dan tidak terdapat saldo di bendahara penerimaan LPMP tetap melakukan pencatatan yang dilakukan oleh bendahara penerimaan. Pencatatan ini sangatlah penting sebagai dasar pembuatan laporan keuangan. Pencatatan PNBPN dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki kebijakan akuntansi tersendiri yang berbeda dengan lainnya.

Bedasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengambil judul untuk tugas akhir **“KEBIJAKAN AKUNTANSI PENCATATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBPN) ATAS PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JOGJA”**.

1.2. Tujuan Magang

Tujuan dari kegiatan magang ini adalah sebagai berikut :

- a. Memahami kebijakan akuntansi pencatatan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan Barang Milik Negara pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jogja
- b. Memahami prosedur pencatatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jogja.

1.3. Target Magang

Bedasarkan tujuan magang diatas maka target yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Mampu menjelaskan kebijakan akuntansi pencatatan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan Barang Milik Negara pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jogja
- b. Mampu menjelaskan prosedur pencatatan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jogja.

1.4. Bidang Magang

Pelaksanaan kegiatan magang dilakukan pada bidang keuangan. Tugas pada bidang keuangan adalah :

- a. Melakukan pencatatan penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan Barang Milik Negara oleh Bendahara Penerimaan
- b. Melakukan penginputan transaksi penerimaan keuangan ke dalam sistem penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk disetorkan ke Negara.

1.5. Lokasi Magang

Perusahaan : Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jogja

Alamat : Kalasan, Karang Nongko, Tirtomartani, Sleman,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Kode Pos : 55571

Nomor Telepon : (0274) 496921

Email : lpmp.diy@kemdikbud.go.id

Koordinat Lokasi :

[https://www.google.com/maps/place/Lembaga+Penjaminan+Mutu+Pendidikan+\(LPMP\)+D.I.+Yogyakarta/@-7.752326,110.471569,17z/data=!3m1!4m5!3m4!1s0x2e7a5a5519b328af:0x7df2266de9de8b18!8m2!3d-7.752326!4d110.471569](https://www.google.com/maps/place/Lembaga+Penjaminan+Mutu+Pendidikan+(LPMP)+D.I.+Yogyakarta/@-7.752326,110.471569,17z/data=!3m1!4m5!3m4!1s0x2e7a5a5519b328af:0x7df2266de9de8b18!8m2!3d-7.752326!4d110.471569)

1.7. Sistematika Penulisan Laporan Magang

Secara sistematika penulisan laporan magang ini terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang dasar pemikiran magang, tujuan magang, target magang, bidang magang, lokasi magang, jadwal magang, dan sistematika penulisan laporan tugas akhir di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Yogyakarta.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi tentang dasar-dasar teori yang menjelaskan tentang permasalahan yang terkait dengan inti pembahasan.

BAB III ANALISA DESKRIPTIF

Bab ini terdiri dari data umum dan data khusus. Data umum menjelaskan tentang gambaran umum di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Yogyakarta, seperti sejarah perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi, tugas dan wewenang, serta tugas dan fungsi di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Yogyakarta. Sedangkan data khusus mendeskripsikan data hasil yang didapat di tempat magang sesuai dengan tujuan yang dibahas seperti dokumen dan buku-buku yang digunakan dalam pencatatan PNBP di LPMP dan prosedur pencatatan PNBP di LPMP.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menguraikan kesimpulan dari proses penyusunan laporan magang dan mencoba untuk memberikan masukan atau saran kepada LPMP yang diharapkan dapat membantu dan bermanfaat.

